BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) (K.Yin,1994:1-15). Alasan penulis menggunakan metode ini ialah: *pertama*, studi formulasi kebijakan desentralisasi kasus kebijakan perkebunan kelapa sawit melibatkan banyak variabel. Dalam kondisi seperti itu, sedikit variabel yang dapat dikontrol secara jelas. Untuk mengatasinya, dipilihlah strategi penelitian studi kasus. *Kedua*, metode studi Kasus memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode lain, karena secara khusus memfokuskan pada kasus di daerah tertentu. Sehingga metode ini cenderung terfokus, detail, objektif, dan lebih terarah secara sistimatis (K.Yin,1994: 101).

2. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis penelitian ini, data yang diperlukan meliputi; kondisi perpolitikan Riau sebelum dan sesudah 2005, sejarah perkebunan kelapa sawit di Riau, pilihan-pilihan kebijakan perkebunan masing-masing aktor lokal 2005-2010, Koalisi aktor dengan lembaga-lembaga sosial. Sumber data baik data sekunder maupun primer. Sumber data skunder diperoleh dari bahan dokumen yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit, baik dicetak ataupun elektronik. Sumber data sekunder ini adalah; laporan penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku, Peraturan perundangan baik berupa Undang-undang, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Keputusan Menteri Pertanian, Peraturan Daerah yang mengatur perkebunan kelapa sawit di Riau, surat kabar Riau Pos, Riau Tribune, Riau Mandiri, Kompas,

majalah Eksekutif, Tempo, peta lokasi, brosur, selebaran, risalah rapat, data direktori perusahaan perkebunan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), dan bahan yang bersumber dari websites in-ternet.

Selanjutnya, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh lokal yang mengetahui sejarah dan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Riau yang berada pada empat wilayah Kabupaten yang dianggap memiliki luas lahan sawit terbesar; Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, dan Siak. Tujuan wawancara itu adalah: *Pertama*, untuk mengungkapkan dukungan masing-masing aktor terhadap pilihan kebijakan perkebunan kelapa sawit; *Kedua*, untuk mengumpulkan data lebih lengkap mengenai elit kebijakan perkebunan; dan *Ketiga*, untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana aktor mengorganisir diri dan berkoalisi dengan kelompok social lain. Sebelum memilih aktor lokal terlebih dahulu perlu menyusun peta sementara elit lokal. Secara umum kajian ini membagi dua kategori aktor konteks lokal, yaitu aktor pemerintah dan non-pemerintah. Aktor pemerintah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten seperti: gubernur Riau, sekretaris Daerah, Bupati, Kepala Dinas perkebunan, Kepala Dinas kehutanan, Badan pertanahan nasional (BPN), Ketua atau anggota DPRD provinsi dan kabupaten, tokoh bisnis, tokoh politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, Badan Eksekutif mahasiswa, perbankan, pengusaha swasta perkebunan (domestik, internasional), pengusaha Negara perkebunan, dan perorangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Riau.

Pengusaha-pengusaha dan perusahaan perkebunan besar dipilih berdasarkan kriteria-kriteria berikut. *Pertama*, hubungan mereka dengan para birokrat, atau beberapa pejabat pemerintah (Daerah) yang berkuasa, partai politik, politisi, elit yang

berpengaruh, yang masing-masing berakibat pada proses kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau. *Kedua*, posisi atau reputasi yang mereka miliki pada tingkat lokal sebagai pelaku usaha perkebunan. *Ketiga*, tindakan-tindakan Aktor dalam mengorganisir diri. *Keempat*, keberhasilan operasional usaha sejak berdirinya perusahaan.

Selain itu, data primer diperoleh juga melalui observasi langsung dengan membuat kunjungan lapangan kepada peristiwa yang terkait isu kebijakan kelapa sawit. Observasi ini meliputi , seperti rapat terbuka, pertemuan, demonstrasi, kunjungan ke lokasi perkebunan. Tujuan observasi ini adalah untuk memotret kondisi lingkungan politik yang relevan dan memuat karakteristik kasus (K.Yin,1994:113). Dalam observasi in data diperoleh berupa: foto, selebaran, catatan, naskah orasi atau pidato aktor, pesan spanduk.

3. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan *Modern Political Economy* yang memuat empat langkah seperti yang dijelaskan Frieden (1991) yaitu, analisis dilakukan dalam empat langkah sesudah dimodifikasi demi penyesuaian dengan konteks penelitian ini: *Pertama*, merumuskan atau mengidentifikasi aktor-aktor yang “mendukung” atau yang “menolak” dalam wacana dan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Riau, dan menentukan apa yang menjadi tujuan dan kepentingannya. Langkah ini mengasumsikan para aktor adalah individu atau institusi yang berupaya memaksimalkan utilitas, dan melakukan perhitungan keuntungan dan kerugian sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan. Aktor-aktor tersebut baik yang berasal dari kalangan birokrasi seperti Gubernur, Bupati, Dinas perkebunan, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perivinsi

Riau. Selain itu akan dianalisis juga perilaku aktor dari kalangan Perusahaan pengembang kebun sawit K2I misalnya PT.Eka Gerbang.

Kedua, menggambarkan preferensi masing-masing aktor mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit yang akan diterapkan di Riau. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat setidaknya empat pola kebijakan pengembangan kelapa sawit yakni Pola ; Perkebunan Besar Swasta, Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Rakyat, dan Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Dari keempat pola tersebut dalam pelaksanaannya terdapat paling tidak empat isu utama yang terkait dengan kebijakan perkebunan, yaitu; pertanahan, lapangan kerja, teknologi, dan lingkungan. Dalam menentukan pilihan-pilihan terhadap penanganan isu-isu ini para aktor digambarkan sebagai pihak yang suka pada pola yang dapat memaksimalkan keuntungannya.

Ketiga, mendiskripsikan bagaimana para aktor berkoalisi dalam mencapai tujuan. Koalisi ini dilakukan dalam rangka memperkuat daya tawar terhadap kelompok lain. Para aktor mengkrompomikan kepentingannya dengan aktor atau kelompok lainnya. Langkah ini antara lain bertujuan untuk mendapatkan dukungan dalam memperkuat koalisi. Dalam kasus pembangunan kelapa sawit di Riau. Kelompok yang "mendukung" perolehan "hasil" kelapa sawit baik yang berasal dari kalangan pemerintah Daerah maupun swasta melakukan konsolidasi. Tujuannya agar dapat meyakinkan pihak yang menolak "rejek" pembangunan kelapa sawit pada akhirnya dapat menerima.

Keempat, menganalisis bagaimana para aktor berinteraksi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan untuk mencapai tujuan. Apakah memakai pendekatan "bergaining", "persuasi", atau "komando" (Mas'ood,2004:). Aktor yang responnya "mendukung" pembangunan perkebunan kelapa

sawit baik dari Pemerintah Daerah maupun Swasta mempunyai sumber daya ekonomi-politik besar berkemungkinan melakukan tawar menawar atau "tekanan" kepada aktor atau kelompok yang responnya "menolak" kebijakan atau "hasil" perkebunan kelapa sawit yang diperoleh masyarakat Riau.